



HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN BERBAGI MANFAAT, BERBAGI BEBAN

© Christiaus W. Djoko/YKAN



© Bastian AS/TNC Photo Contest 2019

Berjarak 15 kilometer dari pusat kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) menjadi penopang kehidupan wilayah urban Balikpapan. Hutan lindung seluas 9.782 hektare ini memiliki tutupan hutan yang masih terjaga baik, dengan tingkat keanekaragaman hayati tinggi dan menyediakan jasa ekosistem yang vital bagi lingkungan sekitarnya, khususnya daerah aliran sungai (DAS) Wain.

Berbagi Manfaat, Berbagi Beban



Keanekaragaman Hayati Hutan Lindung Sungai Wain



225

jenis satwa

29%

di antaranya termasuk daftar merah IUCN

234

spesies burung

32

32 spesies di antaranya jenis yang dilindungi

94

spesies mamalia

45

45 spesies di antaranya jenis yang dilindungi

17

spesies ikan

17

spesies amfibi

126

spesies serangga

Jenis Satwa Liar yang Berstatus Dilindungi dan Terancam Punah di HLSW

Macan dahan

(*Neofelis nebulosa*)

Beruang madu

(*Helarctos malayanus*)

Lutung merah

(*Presbytis rubicunda*)

Uwa-uwa

(*Hylobates muelleri*)

Orang utan

(*Pongo pygmaeus*)

Kera ekor panjang

(*Macaca fascicularis*)

Beruk

(*Macaca nemestrina*)

Bekantan

(*Nasalis larvatus*)
satwa endemik Kalimantan

Lutung dahi putih

(*Nycticebus coucang*)

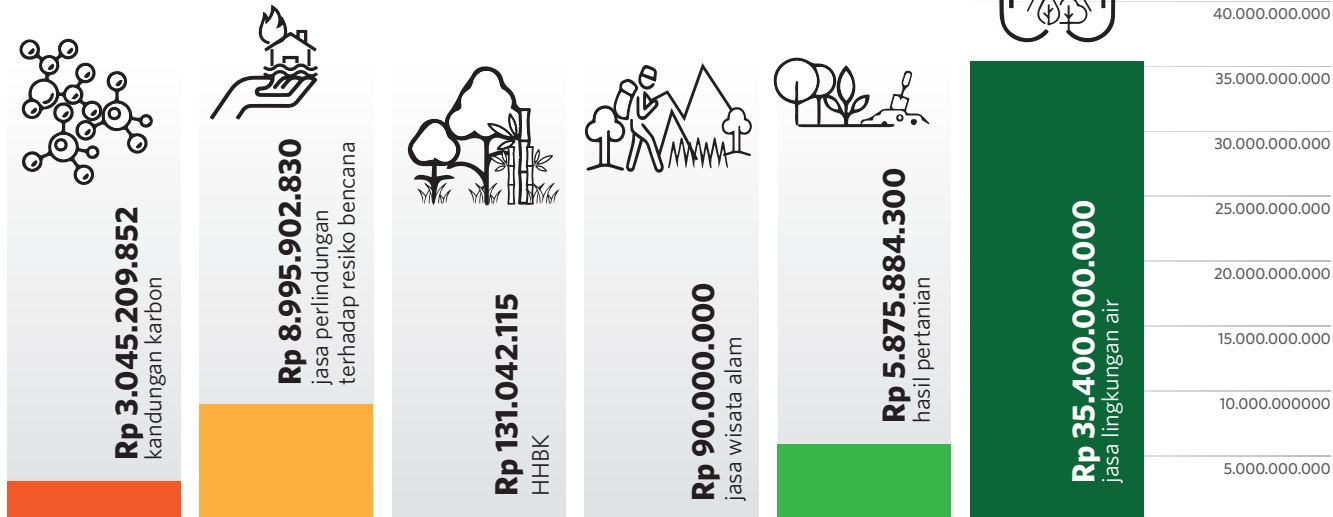


Nilai Ekonomi HLSW

Nilai potensi hutan dan jasa lingkungan
Rp 53.538.039.097 per tahun, terdiri dari:



(per tahun)



Jasa Ekosistem Hutan Lindung Sungai Wain

Memiliki keindahan dan keanekaragaman hayati yang tinggi, HLSW merupakan salah satu destinasi wisata minat khusus, dengan perpaduan wisata hutan dan sungai yang memikat. HLSW terdiri dari hutan primer alami (sekitar 5 ribu hektare) dan sisanya merupakan gabungan hutan sekunder tua maupun sekunder muda yang merupakan sisa kebakaran dan pembalakan liar.

HLSW pun menjadi penopang kehidupan mayoritas masyarakat di sekitar kawasan HLSW, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Secara umum pemanfaatan hutan lindung dapat dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK). HHBK dalam areal masyarakat dan di area HLSW (km 15 ke atas hingga perbatasan dengan areal PT Inhutani I) adalah aren (gula merah), karet (lateks), bambu (rebung), durian, lai, cempedak, dan lain-lain.

Sejak 2011, pemerintah telah memberi izin pemanfaatan lahan Hutan Kemasyarakatan seluas 1.400 hektare, yang

digunakan sebagai lahan budi daya tanaman oleh masyarakat. Di antaranya dengan membudidayakan karet, durian, rambutan, buah naga, dan ragam jenis sayuran. Masyarakat juga memanfaatkan kawasan HLSW untuk kebutuhan kayu bakar, daun nipah, rotan, bambu, gaharu, tumbuhan obat, rumput/pakan ternak, madu, buah-buahan dan sayur serta ikan (Rujehan, 2012).

Masyarakat di luar HLSW mendapat manfaat berupa air dari Waduk HLSW yang disalurkan melalui pipa-pipa Pertamina RU V Balikpapan ke rumah-rumah warga. Air yang disalurkan berupa air baku dan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk air minum. Saat ini Pertamina memanfaatkan waduk dengan luasan 3,1 hektare. Hasil analisis data pengambilan air yang dilakukan oleh Pertamina, rata-rata Pertamina menggunakan air sebanyak 450-750 m³ per jam atau ± 25% dari jumlah kebutuhan air baku yang biasa digunakan oleh seluruh rumah tangga di Balikpapan (KPHL Balikpapan 2015).

 <p>Pengembangan wisata minat khusus</p>	 <p>Menyediakan jasa lingkungan air</p>	 <p>Menghasilkan O₂, menyerap CO₂, dan menyimpan karbon</p>	 <p>Menyediakan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk menunjang kebutuhan hidup masyarakat</p>
---	--	--	---

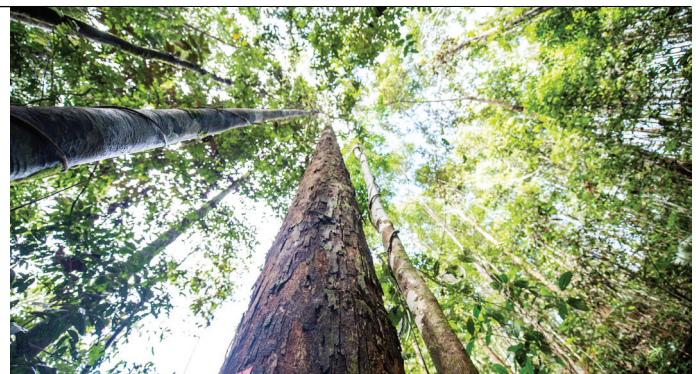
Pengelolaan HLSW

Pengelolaan hutan yang baik dapat melindungi dan meningkatkan kualitas hutan dalam menjaga dan meningkatkan hasil air, sekaligus meningkatkan fungsi hutan sebagai cadangan karbon (*carbon stock*), mereduksi gas karbon dioksida, menghasilkan oksigen di udara dan menjaga keberadaan plasma nutfah, keindahan-kenyamanan, serta sosial-budaya. Sejak diberlakukannya UU 23/2014, pengelolaan HLSW dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Balikpapan. Sebelumnya, selama 16 tahun HLSW dikelola oleh Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (BP-HLSW).

Pengelolaan hutan yang baik membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang andal dan mencukupi, serta pendanaan yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dari semua pemangku kepentingan melalui ragam dukungan. Dukungan tersebut di antaranya berupa dana, tenaga, infrastruktur, promosi, pemikiran, ataupun penerapan teknik-teknik terbaik (*best practices*) pemanfaatan hutan dan lahan di sekitar HLSW.

Tanpa bantuan dari semua pihak, kualitas fungsi-fungsi ekosistem HLSW akan menurun. Tanda-tanda ke arah itu mulai tampak, diindikasikan oleh kualitas dan kuantitas air Waduk Sungai Wain. Dari citra satelit pada tahun 2001, warna air di Waduk Sungai Wain masih biru kehitaman. Sementara pada tahun 2020, warnanya berubah kecokelatan. Hal ini diakibatkan sedimentasi yang tinggi dengan dukungan bukti bahwa Pertamina RU V Balikpapan sudah melakukan pengerukan dasar waduk hingga 3 kali dan terakhir dilakukan pada 2015 dengan biaya Rp 3-4 miliar.

Pada 2015, tinggi air waduk hanya 60 sentimeter, jauh di



© Nick Hall

bawah kondisi optimal yang dibutuhkan oleh Pertamina RU V Balikpapan, yaitu 110 sentimeter. Demikian pula dengan muka air Waduk Sungai Wain harian selama 2015-2020 berfluktuasi cukup tinggi. Pada tahun 2015, muka air Waduk Sungai Wain pernah mencapai tinggi 60 sentimeter (Pertamina, 2020) dan berdasarkan pengamatan lapangan pada Oktober 2020, Sungai Bugis—anak Sungai Wain yang masuk ke waduk Sungai Wain—meluap. Salah satu penyebabnya diduga karena alih fungsi lahan menjadi berbagai bentuk penggunaan. Terlebih dengan peningkatan jumlah penduduk, pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah dan rencana pengembangan Ibu Kota Negara yang lokasinya berdekatan dengan HLSW pelaksanaan perusahaan hutan dan pertambangan, dan sejenisnya turut mempengaruhi kondisi ekosistem HLSW.

Meski dalam rancangan rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke daerah Sepaku dan Samboja tidak menyentuh kawasan HLSW, namun area hutan lindung ini menjadi sangat strategis. Hal ini berpotensi mendorong aktivitas perambahan dan perubahan tutupan hutan. Khususnya di bagian batas utara HLSW atau sepanjang jalan/sekat bakar



© YKAN

sebagai pembatas Kawasan HLSW dengan areal konsesi PT Inhutani I.

HLSW juga menghadapi potensi ancaman dari luar berupa kebakaran hutan, perambahan hutan, pembalakan liar (kayu blambangan), perburuan liar khususnya untuk jenis burung, dan kegiatan pembangunan yang berpotensi mengganggu fungsi hidrologis sungai Wain. Isu-isu hidrologis tersebut memerlukan kerja sama antara KPHL Balikpapan dengan Pertamina RU V Balikpapan dan semua pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan HLSW.

Salah satu upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan HLSW adalah mendorong KPHL Balikpapan memperkuat kemampuan pendanaannya melalui pemanfaatan hutan dan jasa lingkungan HLSW. Pertama, dengan pemanfaatan hutan dan jasa lingkungan HLSW yang menghasilkan pendapatan, akan mengurangi ketergantungan KPHL Balikpapan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kedua, dengan menghasilkan pendapatan, KPHL Balikpapan dapat meningkatkan nilai tambah daerah melalui sumbangannya terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Ketiga, sumbangan PAD tersebut akan memperkuat posisi tawar KPHL Balikpapan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutannya, termasuk dalam pemanfaatan hutan dan jasa lingkungan HLSW.

Skema Pemanfaatan Jasa Ekosistem HLSW

Diperlukan skema pengembangan yang berbeda untuk tiap-tiap pemanfaatan jasa ekosistem di HLSW agar efektif. Skema-skema tersebut meliputi:

1. Untuk pemanfaatan jasa lingkungan air Waduk Sungai Wain, mengembangkan skema kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah dan/atau peningkatan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup sesuai UU 32/2009 dan PP 46/2017.
2. Untuk pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam HLSW, mengembangkan skema kerja sama antara KPHL Balikpapan dengan masyarakat sesuai ketentuan dalam PermenLHK P. 49/2017 dan dengan Pemerintah Kota Balikpapan sesuai ketentuan dalam UU 23/2014, PP 28/2018 dan Permendagri 22/2020.
3. Untuk pemanfaatan HHBK, mengembangkan skema kemitraan kehutanan dalam kerangka Perhutanan Sosial yang diatur dalam PermenLHK P. 83/2016 dan RPP Bidang Kehutanan (Draft ke-18).
4. Untuk pemanfaatan jasa lingkungan karbon, mengembangkan skema pelaksanaan REDD+ yang diatur dalam Permen LHK P. 70/2017.

Untuk mendukung upaya perolehan pendapatan (bisnis) dari pemanfaatan hutan dan jasa lingkungan HLSW diperlukan kebijakan:

Jangka pendek:

1. Penyusunan peraturan pemanfaatan hutan dan jasa lingkungan di tingkat daerah.
2. Membangun kesepakatan dengan pemanfaat jasa lingkungan dan mitra potensial.
3. Komunikasi dengan pengambil keputusan untuk membangun sinergi.

Jangka menengah/panjang:

1. Penyusunan peraturan pola pengelolaan keuangan hasil pemanfaatan hutan dan jasa lingkungan di tingkat daerah.
2. Penguatan SDM untuk pengelolaan kegiatan/program dan dana/keuangan.
3. Membangun jejaring dengan pemangku kepentingan dan donor.

Disadari bahwa sukses atau gagalnya pengembangan pemanfaatan hutan dan jasa lingkungan HLSW sangat tergantung dari kemampuan dan kemauan KPHL Balikpapan dalam menggalang aksi kolektif, membangun narasi dan diskursus yang dapat menjelma menjadi kesepahaman/pengetahuan bersama, membangun jejaring, memilih agen pengawal dan pendukung kebijakan, dan menjalankan proses-proses politik di tingkat daerah. Hanya, sebagai UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, tentu saja gerak KPHL Balikpapan terbatas pada pelaksanaan kebijakan. Pada tataran kebijakan meso dan makro, diperlukan dukungan dari lembaga-lembaga yang berada di atasnya, baik dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat.

Tentang YKAN

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) adalah organisasi nirlaba berbasis ilmiah yang hadir di Indonesia sejak 2014. Memiliki misi melindungi wilayah daratan dan perairan sebagai sistem penyangga kehidupan, kami memberikan solusi inovatif demi mewujudkan keselarasan alam dan manusia melalui tata kelola sumber daya alam yang efektif, mengedepankan pendekatan nonkonfrontatif, serta membangun jaringan kemitraan dengan seluruh pihak kepentingan untuk Indonesia yang lestari.

Konservasi
Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari



Alamat kantor: Graha Iskandarsyah lantai 3 Jl Iskandarsyah no 66C Jakarta Selatan, 12160, Indonesia



@ykan_id



Yayasan Konservasi Alam Nusantara



indonesia@ykan.or.id



ykan.or.id